



**ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan ujian
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

TENGGU PUTRI ANANDITA TAFLI

1715100476

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2022**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
NPM : 1715100476
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
UTARA.

MEDAN, FEBRUARI 2022

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. OKTARINI KHAMILAH, S.E., M.Si)



(Dr. ONNSOMEDALINE, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(ANGGI PRATAMA NASUTION, S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(DONI EFRIZAH, SS., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

Skripsi diterima dan disetujui oleh panitia ujian sarjana program studi
akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
NPM : 1715100476
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1(STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
UTARA.

MEDAN, 15 FEBRUARI 2022

KETUA

(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si)

ANGGOTA I

(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si)

ANGGOTA II

(Dr. Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA III

(Vina Arnita, S.E., M.Si)

ANGGOTA IV

(Nur Aliah, S.E., M.Si., Ak., CA)

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
NPM : 1715100476
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Pancabudi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



an, 15 Februari 2022

(Tengku Putri Anandita Tafl)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 29-07-1999
NPM : 1715100476
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : jalan suka damai

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 08 Maret 2022



TENGKU PUTRI ANANDITA TAFI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 29 Juli 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100476
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.53
 Nomor Hp : 081269439193

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I,

Cahyo Pramono, SE., MM.

Medan, 25 September 2020

Pemohon,

(Tengku Putri Anandita Tafla)

Tanggal : 30 September 2020
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal : 30 September 2020
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 30 September 2020
 Disetujui oleh:
 Ka. Prod Akuntansi

 Dr. Rahima Br. Purba, S.E., M.Si

Tanggal : 30 September 2020
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Dini Enizah, SS., MS)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



Her Samir Profesi
[Signature]
Aggi P.B.U
20/3/2021

**ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

PROPOSAL

Oleh :

TENGGU PUTRI ANANDITA TAFLI
1715100476

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**

Acc Sidang
4/01/22
toping II

3/1/22



*Acc Sidang
Steps
20/12/2021
Agg*

**ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

TENGGU PUTRI ANANDITA TAFLI
1715100476

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

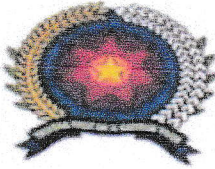
Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Doni Efrizah, SS., M.Si
 Nama Mahasiswa : TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100476
 Jenjang Pendidikan : S1(Strata Satu)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11/2021	Penambahan Analisis Data		
14/2021	Penambahan standar/prosedur pelaporan keuangan		
	Revisi data by s P.B I 03/12/2021		

Medan, 03 Desember 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

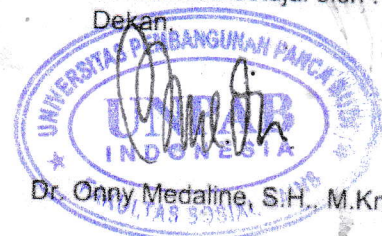
Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Doni Efrizah, SS., MS
 Nama Mahasiswa : TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100476
 Jenjang Pendidikan : S1(Strata Satu)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21/12/2021	Perbaikan keterangan sumber gambar pada bab IV		
28/12/2021	Perbaikan Penulisan bab V bagian kesimpulan		
04/01/2022	Acc Sidang Meja Hijau		

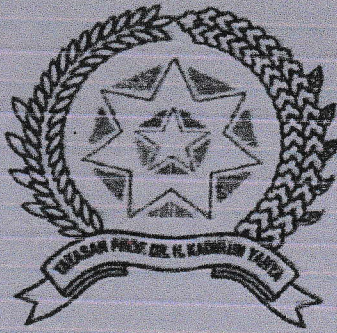
Medan, Desember 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



Acc
hex
Juni
Agg 2
22/2/22
Ary
fian

**ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan ujian
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi.

Acc jilid lux
22/02/22

Oleh :

TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
1715100476

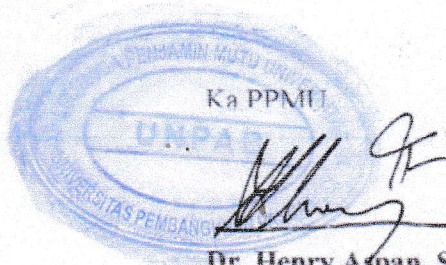
**: PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

SURAT KETERANGAN
TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1 repository.ummat.ac.id 6%
Internet Source
- 2 jurnal.pancabudi.ac.id 5%
Internet Source
- 3 repositori.usu.ac.id 2%
Internet Source
- 4 123dok.com 2%



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1224/PERP/BP/2022

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
NIM : 1715100476
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Kelas/Prodi : Akuntansi

Sejak tanggal 05 Januari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 05 Januari 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Efektif : 04 Juni 2015

Medan, 19 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 29 Juli 1999
Nama Orang Tua : TENGKU AMRI TAFLY
N. P. M : 1715100476
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081269439193
Alamat : Jalan metrologi 3 no 83

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



TENGKU PUTRI ANANDITA TAFLI
1715100476

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara periode 2019 serta cara mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam proses penelitian penulis menggunakan data primer serta data sekunder dimana data utama tersebut berasal melalui hasil wawancara dan observasi. Data pendamping diambil melalui dokumentasi berupa daftar Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa beberapa faktor yang mengindikasikan adanya keterlambatan penyusunan laporan yaitu Sumber daya manusia pada indikator kurangnya pemahaman akuntansi dan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu, pengendalian internal pada indikator evaluasi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kurangnya memberikan sanksi yang tegas terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Kata kunci: faktor-faktor keterlambatan, Laporan Keuangan, Sumber daya manusia, Pengendalian internal

ABSTRACT

This research examines "Analysis about the causes delays on submitting financial reports to Regional Apparatus Organizations and Regional Owned Enterprises in the North Sumatra Provincial Government". This research aims to find out the causes preparation delay on BPKAD financial report North Sumatera Province in 2019 and for fixed the problems that came. Method research that been used is descriptive qualitative. Primary data come from interviews with observation. Secondary data in the form of Regional Apparatus Organizations and Regional Owned Enterprises the late one gave the financial report and another companion data. The result showed that the causes of preparation delay on financial reports there several factors its human resources is less on accounting knowledge and doesn't have Accountant educational background. Rather than that internal control on lack of strict sanctions for the delay of the submission financial reports by Regional Apparatus Organizations and Regional Owned Enterprises.

Keywords: Factors of lateness, Financial Report, Human Resources, Internal Control

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat membuat skripsi yang disusun untuk memenuhi syarat, guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Adapun judul skripsinya adalah sebagai berikut : **“Analisis Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”**.

Selama pembuatan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan rintangan, namun berkat kerja keras dan dorongan arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, rintangan tersebut dapat diatasi dan proses penulisan skripsi dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

4. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Doni Efrizah, SS., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dalam perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Sosial Sains Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah membekali Ilmu serta berbagai pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepala Badan dan seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan nasehat dan motivasi.
8. Teristimewa buat Ayahanda tercinta (Alm) Tengku Amri Tafly dan Syamsul Bahri Tanjung Ibunda Tercinta Dzulfita, Asni, Abfeni yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril serta kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus Muhammad Aulia Syam Putra Tanjung, (Alm)Nanda Bertha Azora, T Novita Tafly, Ridho Putra Anandaya dan seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan yakni, Cindy Fitria, Indah Syafira, Sofia Rani Dewi, Yulya Suandi yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Semua teman-teman Mahasiswa/I stambuk 2017 yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan studi.

12. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri yang sudah berhasil bertahan sampai sejauh ini yang akan terus semangat dan berjuang kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang.

Medan, Februari 2022
Penulis

Tengku Putri Anandita Tafli

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Batasan Masalah	7
1.3. Perumusan Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	11
2.1.2. Teori Kinerja.....	12
2.1.3. Kinerja Keuangan Pemerintah.....	13
2.1.4. Laporan Keuangan.....	15
2.1.4.1. Pengertian Laporan Keuangan	15
2.1.4.2. Konsep Laporan Keuangan Pemerintah	16
2.1.4.3. Komponen Laporan Keuangan.....	20
2.1.4.4. Pengguna Laporan Keuangan.....	23
2.1.4.5. Tujuan Pelaporan Keuangan.....	24
2.1.4.6. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	25
2.1.4.7. Peranan Pelaporan Keuangan	25
2.1.5. Pelaporan APBD oleh OPD.....	27
2.1.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan	28
2.1.6.1. Sumber Daya Manusia	28
2.1.6.2. Teknologi Informasi	29
2.1.6.3. Pengendalian Internal	31
2.2. Penelitian Sebelumnya	33
2.3. Kerangka Pemikiran.....	35

BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	38
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	39
3.3.1. Variabel Penelitian.....	39
3.3.2. Definisi Operasional	39
3.4. Jenis dan Sumber Data	41
3.4.1. Jenis Data.....	41
3.4.2. Sumber Data	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1. Sejarah Singkat BPKAD	45
4.1.2. Visi dan Misi	46
4.1.3. Susunan Organisasi BPKAD	48
4.1.4. Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD	49
4.1.5. Data Personalia	61
4.1.6. Stuktur Organisasi BPKAD	61
4.1.7. Analisis Data.....	63
4.2. Pembahasan.....	76
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan tahun 2019	4
Tabel 2.1. Peneliti Sebelumnya.....	33
Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian	39
Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel	40
Tabel 4.1. Data Personalia Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	61
Tabel 4.2. Faktor-Faktor Sumber Daya Manusia.....	64
Tabel 4.3. Faktor-Faktor Teknologi Informasi	67
Tabel 4.4. Faktor-Faktor Pengendalian Internal	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1. Stuktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).....	62
Gambar 4.2 Siklus Akuntansi Pemerintah.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sektor publik Pemerintah Indonesia diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab, karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen yang memuat fakta-fakta penting yang harus diungkapkan untuk acuan eksternal sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perihal Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa fakta yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dapat bermanfaat jika fakta tersebut dapat disajikan sesuai dengan beberapa kriteria mengenai kualitas fakta/informasi antara lain, relevan, andal, bisa dibandingkan dan dapat diterima.

Laporan Keuangan Pemerintah disusun sesuai dengan prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah disampaikan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat umum setelah melalui proses audit. Unsur-unsur yang disampaikan dalam laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah antara lain: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-

undang dan peraturan menetapkan tenggat waktu untuk penyampaian laporan keuangan, pemerintah daerah diharapkan untuk menyampaikan laporan keuangannya pada waktu yang tepat.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan pemahaman akuntansi penuh yang dibantu dengan pelatihan dan latar belakang pendidikan untuk menunjang kinerja dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu, diwajibkan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mendukungnya. Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah juga harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan.

Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan diadopsi oleh Komite Prinsip Akuntansi Keuangan pada tanggal 24 Agustus 1994, dan disetujui oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia, yang disahkan untuk pengembangan pada 07 September 1994. Sehubungan dengan penyajian Sumber Daya Manusia dalam pelaporan keuangan, sebagaimana diatur dalam paragraf 53, Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan “manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam suatu aset adalah kontribusi potensial dari aset tersebut secara langsung ataupun produktif, itu adalah bagian dari kegiatan fungsional perusahaan”. Pada Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan di Nomor 57: “Meskipun kemampuan perusahaan untuk mengendalikan kepentingan perusahaan umumnya biasanya berasal dari hak hukum, tetapi barang atau jasa mampu mencakup definisi aset dengan menjaga kerahasiaan pengetahuannya”.

Dari sini kita dapat memahami bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk “*human resources*” yang menurut sifatnya biaya-biaya tersebut merupakan pembentukan modal manusia (*human capital formation*), dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset. Perlakuan akuntansi yang terkait dengan *cost* atau nilai dari *human resources* (Sumber Daya Manusia) dikenal dengan istilah “Akuntansi Sumber Daya Manusia” (*human resource accounting*). Tetapi, masalahnya pada saat ini dalam hal perakuntasian belum melakukan biaya pembentukan Sumber Daya Manusia dalam laporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang secara jelas mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa Laporan Keuangan harus diberikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah periode tahun anggaran berakhir. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan untuk laporan keuangan pemerintah daerah dikirim oleh Organisasi Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sesudah diterimanya laporan keuangan dari pemerintah daerah”.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 disampaikan bahwa Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah proses penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelapor setelah konsolidasi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah sebagai satuan akuntansi.

Undang-undang mengenai akuntansi pemerintah saat ini nyatanya tidak mengatasi masalah yang muncul di sektor pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang harus disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 15 Januari. Namun dengan adanya peraturan dan regulasi yang telah dikeluarkan ini masih saja terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Berikut disajikan data keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019:

Tabel 1.1. Data keterlambatan OPD dan BUMD dalam Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

NO	OPD	TANGGAL YANG DITETAPKAN PP NO 12 TAHUN 2019	TANGGAL PENYERAHAN
1	Inspektorat	15 Jan 2020	22 Jan 2020
2	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang	15 Jan 2020	25 Jan 2020
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	15 Jan 2020	24 Jan 2020
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15 Jan 2020	24 Jan 2020
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15 Jan 2020	24 Jan 2020

6	Dinas Perhubungan	15 Jan 2020	23 Jan 2020
7	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu	15 Jan 2020	24 Jan 2020
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15 Jan 2020	25 Jan 2020
9	Biro Bina Perekonomian	15 Jan 2020	24 Jan 2020
10	Rumah Sakit Haji Daerah	15 Jan 2020	29 Jan 2020
11	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	15 Jan 2020	29 Jan 2020
12	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	15 Jan 2020	29 Jan 2020
13	Biro Organisasi	15 Jan 2020	29 Jan 2020
14	Biro Administrasi Pembangunan	15 Jan 2020	27 Jan 2020
15	Biro Hukum	15 Jan 2020	1 Feb 2020
16	Badan Kepegawaian Daerah	15 Jan 2020	31 Jan 2020
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15 Jan 2020	31 Jan 2020
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15 Jan 2020	31 Jan 2020
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15 Jan 2020	30 Jan 2020
20	Biro Pemerintahan	15 Jan 2020	31 Jan 2020
21	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	15 Jan 2020	2 Des 2020
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15 Jan 2020	4 Feb 2021
23	Sekretariat DPRD	15 Jan 2020	4 Feb 2020
24	Biro Sosial	15 Jan 2020	5 Feb 2020
25	Satuan Polisi Pamong Praja	15 Jan 2020	3 Feb 2020
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15 Jan 2020	3 Feb 2020
27	Dinas Sosial	15 Jan 2020	5 Feb 2020
28	Biro Umum	15 Jan 2020	5 Feb 2020
29	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	15 Jan 2020	5 Feb 2021
30	Dinas Tenaga Kerja	15 Jan 2020	5 Feb 2020
31	Badan Penghubung	15 Jan 2020	6 Feb 2020
32	Dinas Perkebunan	15 Jan 2020	6 Feb 2020
33	Biro Humas Dan Keprotokolan	15 Jan 2020	5 Feb 2020
34	Dinas Lingkungan Hidup	15 Jan 2020	6 Feb 2020
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15 Jan 2020	7 Feb 2020
36	Biro Otonomi Daerah	15 Jan 2020	6 Feb 2020
37	Dinas Kehutanan	15 Jan 2020	7 Feb 2020

38	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	15 Jan 2020	7 Feb 2020
39	Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	15 Jan 2020	7 Feb 2020
40	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. M. Ildrem	15 Jan 2020	8 Feb 2020
41	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	15 Jan 2020	10 Feb 2020
42	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	15 Jan 2020	8 Feb 2020
43	Dinas Pemuda Dan Olahraga	15 Jan 2020	11 Feb 2020
44	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	15 Jan 2020	8 Feb 2020

NO	BUMD	TANGGAL YANG DITETAPKAN PP NO 12 TAHUN 2019	TANGGAL PENYERAHAN
1	PT. Kawasan Industri Medan	15 Jan 2020	3 Feb 2020
2	PT. PDAM Tirtanadi	15 Jan 2020	3 Feb 2020
3	PT. Bank Sumut	15 Jan 2020	3 Feb 2020
4	PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	15 Jan 2020	3 Feb 2020
5	PT. Dhirga Surya	15 Jan 2020	3 Feb 2020
6	PD. Aneka Industri Dan Jasa	15 Jan 2020	3 Feb 2020
7	PT. Perkebunan Sumatera Utara	15 Jan 2020	3 Feb 2020

Sumber: BPKAD Provsu., 2021

Dari data di atas terlihat bahwa masih adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara periode 2019 yang terdiri dari 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 7 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal yang menyebabkan ketidaktepatan waktu penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah OPD dan BUMD lambat menyampaikan laporan Laporan Keuangan nya kepada BPKAD. Meskipun sifat kualitatif penyajian laporan keuangan termasuk dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah,

laporan keuangan wajib untuk diajukan sesuai dengan jadwalnya sehingga bisa dipergunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Dari penjelasan diatas, maka penulis ingin menganalisis keterlambatan penyampaian laporan keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Utara sehingga penulis tertarik dengan judul **“Analisis Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Menurut uraian latar belakang permasalahan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ialah:

- a. Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal yang tidak kompeten menyebabkan BPKAD terlambat dalam menyusun Laporan Keuangan.

1.2.2. Batasan Masalah

Untuk batasan masalah penelitian ini, hanya menganalisis penyebab dari keterlambatan penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang berasal dari deskripsi latar belakang masalah penelitian ialah:

- a. Apakah sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian internal menjadi alasan ketidaktepatan waktu penyusunan laporan

keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara?

- b. Bagaimana cara mengatasi ketidaktepatan waktu penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berasal dari uraian latar belakang masalah penelitian ialah:

- a. Untuk mengetahui sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian internal menjadi alasan ketidaktepatan waktu penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk dapat mencegah serta memperbaiki kesalahan akibat ketidaktepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dengan adanya penelitian ini semoga memberikan manfaat bagi semua pengguna, diantaranya:

- a. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang alasan keterlambatan penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, dengan adanya penelitian ini semoga hasil penelitian dapat dijadikan dasar pertimbangan dan masukan guna peningkatan kualitas kinerja pemerintah.
- c. Bagi almamater, hasil dari penelitian semoga dapat menjadi bahan pembandingan, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik mengenai penyebab keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Febilia Yolanda (2015), Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berjudul: “Analisis faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

- a. **Model penelitian:** penelitian sebelumnya dan saat ini sama menggunakan model penelitian Deskriptif Kualitatif
- b. **Waktu penelitian:** Penelitian sebelumnya tahun 2015 dan penelitian saat ini 2021.
- c. **Lokasi penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, untuk

penelitian saat ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

R.A. Supriyono (2018:63) menyatakan bahwa hubungan berdasarkan kontrak antara pemimpin dengan lembaga adalah arti dari rancangan teori keagenan itu sendiri. Hubungan ini dibuat untuk suatu pelayanan dimana pemimpin memberikan kekuasaan kepada lembaga untuk mengambil keputusan akhir yang terbaik untuk pemimpin dengan mengedepankan pengoptimalan keuntungan hingga tercapainya beban yang minim dengan cara menghindar, seperti beban pajak. Teori keagenan merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemilik perusahaan (pemegang saham) ke manajemen perusahaan guna mengelola aktivitas perusahaan berdasarkan kontrak yang telah ditetapkan. Pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan harus memiliki tujuan yang sejalan untuk peningkatan nilai perusahaan, dan manajemen perusahaan akan mengambil langkah sesuai dengan tujuan dari pemilik perusahaan.

Bagi investor laporan keuangan yang tepat waktu memainkan peran penting, hal tersebut karena informasi yang sangat penting ada dalam laporan keuangan baik tentang perusahaan dalam nilai moneter, peluang masa depan perusahaan dan memiliki nilai bagi pengguna yang besar dengan berdasarkan informasi laporan keuangan. Fakta dalam laporan keuangan dipergunakan investor guna mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam aset untuk membuat keuntungan dan pengembalian, dengan peningkatan pemindahan

kekayaan kepada pemilik perusahaan tetap. Dalam situasi dimana perusahaan mendapatkan laba, manajemen perusahaan akan memberikan tanda ke investor untuk membantu keberlangsungan posisi manajemen yang ada sekarang serta kompensasi berlipat bagi manajemen. Ketika perusahaan memperoleh laba maka tingkat kepercayaan terhadap manajemen juga meningkat, sehingga manajer dengan sukarela mengungkapkan laporan keuangannya sesegera mungkin dan akan segera memberikan informasi ketika kinerja suatu perusahaan baik. Maka sebaliknya ketika perusahaan memperoleh rugi, manajer akan berusaha menunda mengumumkan laporan keuangan dan memberikan batasan informasi.

Situasi tersebut memunculkan keadaan yang sering disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*). Makna dari asimetri informasi adalah suatu keadaan yang mana pihak perusahaan kurang mempunyai informasi yang baik perihal kinerja pihak manajemen dan pihak manajemen tidak memberikan informasi untuk pihak perusahaan tentang usaha apa yang telah dilakukan pihak manajemen pada kenyataannya untuk perusahaan.

2.1.2. Teori Kinerja

Pertumbuhan dan kemajuan suatu organisasi tidak dapat dipungkiri jika unsur kualitas manajemen kinerja membawa pengaruh sebagai *driven force* (kekuatan pendorong) yang mampu mempercepat arah tersebut. Menurut Kasmir (2016:182), Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dengan menyelesaikan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan selama periode waktu tertentu. Rivai dan Basri dalam Masram (2017:138) menyatakan bahwa, Kinerja adalah hasil atau tingkat pencapaian seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas yang

berkaitan dengan kemampuan yang berbeda, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu atau disepakati bersama. Menurut V. Wiratna (2017:71), kinerja adalah hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan satu sama lain.

Menurut Mathis dan Jackson dalam Masram (2017:138) juga disebutkan, Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya menurut Mangkunegara dalam Masram (2017:139) menyatakan bahwa, Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai tanggung jawab yang telah diberikan selama periode waktu tertentu.

2.1.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja adalah gambaran sejauh mana pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dimaksudkan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang dituangkan dalam *strategic planning* suatu organisasi. (Mohammad Mahsun,2012).

Menurut Edison (2016), kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu menurut ketentuan atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Mangkunegara (2009) dalam

Setyowati dan Haryani (2016) mengemukakan bahwa, istilah kinerja dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja dan prestasi yang sebenarnya) adalah hasil kerja dari kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan atau organisasi telah melakukannya menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). 4

Menurut Ardila dan Putri (2015), kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang penting untuk digali dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintah, karena ketika menerapkan penganggaran berbasis kinerja, maka diperlukan pemerintah yang mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.

Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Sumarjo (dalam Adhiantoko 2013) menjelaskan bahwa, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dilakukan dalam kaitannya penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang termasuk pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan

dengan suatu kebijakan atau perundang-undangan untuk suatu periode anggaran. Ukuran kinerja merupakan rasio keuangan yang dibentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah dalam bentuk perhitungan APBD.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2011) adalah, (a) Mengetahui sberapa baik tujuan organisasi tercapai, (b) Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai, (c) Meningkatkan kinerja periode–periode berikutnya, (d) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam mengambil keputusan tentang penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), (e) Memotivasi pegawai, (f) Menciptakan akuntabilitas publik. Menurut Abdul dan Muhammad (2012), pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengarahkan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah untuk menilai apakah pemerintah daerah berhasil melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sejauh mana kemampuan daerah yang telah dicapai dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerah dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

2.1.4. Laporan Keuangan

2.1.4.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5), Laporan Keuangan adalah suatu struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam suatu entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan untuk kepentingan umum ini adalah untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan (*financial*

position), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para penggunanya.

Menurut Kasmir (2018:7), Laporan keuangan adalah pernyataan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat itu atau selama periode tertentu. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan informasi yang berguna untuk pengumpulan keputusan oleh berbagai orientasi yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tercapainya kinerja program dan kegiatan, peningkatan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penerapan belanja, dan realisasi pembiayaan.

2.1.4.2. Konsep Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab kepada publik untuk menjalankan roda pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan pernyataan lisan saja, tetapi perlu didukung dengan pernyataan secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah upaya khusus dalam mewujudkan transparansi dana, tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah, untuk pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Suwardjono (164–177), Gubernur/Bupati/Walikota diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat umum setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terdapat sejumlah kriteria mutu informasi keputusan tertentu, diantaranya adalah:

a. Relevan

Kemampuan informasi dalam membentuk pengguna untuk mencapai tujuan, untuk dipahami maknanya, dan tersedia pada waktu yang tepat untuk memfasilitasi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.

b. Andal

Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan dan kemampuan untuk memverifikasi bahwa informasi tersebut benar atau *valid*, termasuk menentukan simbologi (kecocokan pengukur dan fenomena yang diukur).

c. Dapat dibandingkan

Kemampuan informasi membantu pengguna untuk menggunakan dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kumpulan fenomena ekonomi.

d. Dapat dipahami

Tidak bertindak sesuai keinginan beberapa pihak tertentu atau menguntungkan/merugikan pihak tertentu atau menghindari konsekuensi.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan hasil yang dicapai dari pendapatan, belanja, transfer, biaya dengan anggaran yang telah ditentukan, nilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelapor, dan membantu menentukan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang undangan. Terkait dengan tugas untuk menegakkan tanggungjawab keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mahmudi (2010), terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah harus mempublikasikan laporan keuangan yaitu:

a. Dari sisi internal

Laporan keuangan merupakan sarana pemantauan dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan dan satuan kerja yang menjadi bagiannya (Organisasi Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), khususnya pertanggungjawaban kepala organisasi perangkat daerah kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai Pemerintah daerah dan DPRD.

b. Dari sisi eksternal

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), khususnya tanggungjawab kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditur,

instansi, sponsor, pers, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi sosial dan politik.

Oleh karena itu laporan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga harus dilengkapi dengan ungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* (tata pemerintah yang baik) maka pemerintah harus menyediakan pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (baik internal maupun eksternal), sebagai dasar pengambilan keputusan, alat pengendalian serta evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2014 Laporan Keuangan adalah laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan pemerintah daerah dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor selama periode pelaporan. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa, akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai proses mengumpulkan, mengelola, mengkomunikasikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

Menurut Arief Sugiono dan Edi Untung (2016:1), laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam waktu tertentu. Menurut Harahap (2013:105), laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu

atau selama periode tertentu. Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban yang didalamnya terdapat informasi tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan serta berguna untuk penggunaan laporan Keuangan dalam pengambilan keputusan.

2.1.4.3. Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan mengatur bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam satu laporan keuangan meliputi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Jenis laporan realisasi anggaran terdiri dari empat unsur, antara lain:
 - 1) Pendapatan-LRA
 - 2) Belanja
 - 3) Transfer
 - 4) Pembiayaan (*financing*)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenis laporan perubahan saldo terdiri dari lima unsur, antara lain:
 - 1) Saldo anggaran lebih awal
 - 2) Penggunaan saldo anggaran lebih

- 3) Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran untuk tahun berjalan
 - 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 - 5) Saldo anggaran lebih akhir
- c. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dicantumkan, antara lain:
- 1) Aset
 - 2) Kewajiban
 - 3) Ekuitas
- d. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional, mengandung beberapa unsur laporan, termasuk:
- 1) Pendapatan-LO
 - 2) Beban
 - 3) Transfer
 - 4) Pos Luar Biasa
- e. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur dalam laporan arus kas meliputi dua unsur, antara lain:
- 1) Penerimaan Kas

2) Pengeluaran Kas

f. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos yaitu:

- 1) Ekuitas Awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar
- 4) Ekuitas Akhir

g. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Unsur-unsur laporan keuangan tersebut disajikan oleh masing-masing entitas pelaporan, kecuali:

- 1) Laporan Arus Kas disajikan hanya oleh entitas yang memiliki fungsi perbendaharaan

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan Entitas Pelapor yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

2.1.4.4. Pengguna Laporan Keuangan

Pada dasarnya, masyarakat mempunyai hak dasar terhadap pemerintah, yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*) dimana masyarakat berhak mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui mengapa melaksanakan kebijakan dan keputusan tersebut. Kemudian ada juga hak untuk diberi tahu (*right to be informed*), termasuk hak untuk mendapatkan penjelasan terbuka untuk permasalahan-permasalahan tertentu yang telah menjadi perdebatan public. Terakhir yaitu hak untuk didengar (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo,2009).

Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Berikut pengguna laporan keuangan pemerintah sebagaimana diuraikan:

- a. Masyarakat
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- d. Pemerintah.

2.1.4.5. Tujuan Pelaporan Keuangan

Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang berguna bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a. memberikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelapor mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- c. Memberikan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah meningkat atau menurun, sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan.
- d. Memberikan informasi tentang kecukupan pendapatan periode berjalan untuk membiayai semua pengeluaran.
- e. Memberikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam aktivitas entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai.
- f. Memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

2.1.4.6. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengenai penyajian laporan keuangan bahwa pelaporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang laporan keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara
- b. Undang-Undang dibidang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, yang mengatur Keuangan Daerah
- e. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- f. Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah.
- g. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.1.4.7. Peranan Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk memberikan

informasi yang relevan, mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undang. Setiap entitas pelapor mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan serta hasil yang diperoleh, dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur selama periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah.
- d. Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*) membantu pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode

pelaporan, untuk mendanai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan mendatang akan berbagi beban biaya tersebut.

- e. Evaluasi Kinerja mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, khususnya dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah, untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.5. Pelaporan APBD Oleh OPD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah, PPKD-OPD menyusun laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun anggaran berkenaan dan menyampaikannya kepada Kepala OPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada OPD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan OPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan disiapkan oleh pejabat pengguna anggaran dengan menggunakan anggaran setelah penganggaran di OPD yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan keuangan OPD meliputi, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih. neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan OPD dilampirkan dengan surat pernyataan kepala OPD bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian dan standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan OPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya, telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah disampaikan laporan hasil audit, Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

2.1.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah diantaranya:

2.1.6.1. Sumber Daya Manusia

Desiana Wati (2014) berpendapat bahwa sumber daya manusia (SDM) adalah komponen utama dalam menciptakan laporan yang berkualitas. Ia menjelaskan bahwa kesuksesan dari suatu organisasi tidak saja dipengaruhi dari sumber daya manusia yang ada tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Kompetensi merupakan dasar bagi seseorang untuk

mencapai kinerja yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sumber daya manusia dengan kompetensi yang tepat akan mampu melakukan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis, dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan akan terhindar dari pemborosan waktu serta tenaga, Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia akan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi jika Sumber Daya Manusia yang dipekerjakan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang terakreditasi, mengikuti pendidikan dan pelatihan secara teratur, serta memiliki pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi secara utuh. Kompetensi Sumber Daya Manusia menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2012:40) Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Kompetensi didefinisikan sebagai aspek – aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek – aspek pribadi antara lain menyangkut sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2.1.6.2. Teknologi Informasi

Menurut Darmawan (2012:17) Teknologi Informasi adalah Hasil rekayasa manusia dalam proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya. Dukungan penggunaan teknologi informasi ini juga membantu mempercepat proses pengumpulan informasi, khususnya dalam mengantisipasi besarnya

perubahan-perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sering terjadi. Menurut Tata Sutabri (2014:3) Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Menurut M. Suyanto (2005:11) bahwa indikator dari teknologi informasi yaitu: 1) Hardware (perangkat keras komputer) 2) Software (perangkat lunak komputer) 3) Fasilitas Jaringan Komunikasi. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah. Dalam Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengelolaan data, serta pemulihan data. Teknologi informasi bermanfaat dalam hal kecepatan pengolahan data-data transaksi Pemerintah yang dari tahun ke tahun semakin besar, serta dari segi kualitas data yang semakin kompleks dan rumit dikarenakan peningkatan total jumlah APBN/D dari tahun ke tahun. Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan mengolah data dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat bila dibandingkan dengan kemampuan manusia. dan, bekerja sangat konsisten dan dapat diandalkan (*reliable*).

2.1.6.3. Pengendalian Internal

Reeve et al. (2013, 387) mendefinisikan Pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku

Pengendalian internal adalah salah satu cara untuk mengukur, mengarahkan, serta mengawasi atas kegiatan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai, sehingga semakin baik pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah maka pencapaian tujuan pemerintah yang efektif dan efisien akan tercapai (E. W. Sari & Azlina, 2017).

Secara etimologis menurut James M. Reeve Sistem Pengendalian Internal terdiri dari tiga kata yaitu sistem, pengendalian, dan internal yang memiliki arti kata masing-masing. Secara terminologis, sistem pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam PP Nomor 8 Tahun 2006, Pengendalian Internal adalah suatu proses dibawah pengaruh manajemen untuk menciptakan keyakinan yang memadai atas pencapaian efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat 5 Unsur didalam pengendalian internal diantaranya, lingkungan pengendalian, pemetaan resiko,

kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan monitoring. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tujuan SPIP adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya hal-hal berikut: (1) Efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Negara, (2) tingkat keandalan Laporan Keuangan, (3) melindungi aset Negara, dan (4) mematuhi peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan lain dari pengendalian internal adalah menjamin bahwa data yang diinformasikan ke pihak manajemen adalah nilai yang tingkat keandalannya tinggi, sehingga kemungkinan manajemen mengambil keputusan yang keliru karena data yang salah dapat dijaga tingkat minimal (Naingoalan 2010, 196).

Menurut Nurlis & Yudiati (2017), Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah membutuhkan penerapan SPIP yang dapat memastikan seluruh penyelenggaraan kegiatan dapat terlaksana dengan efektif. SPIP yang telah ditetapkan, tetapi belum efektif, berakibat pada kualitas pelaporan keuangan yang tidak memuaskan. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Maka, Pengendalian intern adalah sarana untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan

memainkan peran penting dalam pencegahan, pendeteksian kesalahan dan penyalahgunaan.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian sebelumnya dan penulis gunakan sebagai referensi untuk menyusun penelitian ini. Beberapa Penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Wike Mustika (2017)	Analisis Faktor - Faktor Penyebab Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan pada satuan Kerja di Kementerian Negara / Lembaga (Studi Kasus Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi	Faktor-faktor Sistem Informasi Akuntansi	Deskriptif Kualitatif	Faktor SDM dengan parameter latar belakang pendidikan, teknologi informasi dengan parameter update aplikasi, sarana pendukung dengan parameter internet, sistem pengendalian intern dengan parameter rangkap jabatan, serta aturan hukum dengan parameter minim pemahaman peraturan perundang-undangan menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan.
2	Febilia Yolanda (2015)	Analisis Faktor - Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Provinsi	Penyusunan Laporan Keuangan	Deskriptif Kualitatif	Nilai informasi dapat dipercaya jika memiliki sumber daya manusia yang tegas dalam penerapan sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan menolak untuk memberikan tanda tangan penerimaan

		Sumatera Selatan			laporan keuangan yang terlambat diserahkan
3	Kiki Oktria Fitriandhani (2019)	Analisis Faktor - Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Provinsi NTB	Penyusunan Laporan Keuangan	Deskriptif Kualitatif	Dalam penyusunan laporan keuangan terdapat faktor penyebab keterlambatan adalah teknologi informasi yang sering mengalami eror, wewenang dan prosedur pencatatan yang sampai saat ini memberikan kesempatan kepada SKPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan serta tidak menerapkan sanksi tegas keterlambatan penyampaian laporan keuangan SKPD.
4	Mirawati, Nesa Yuliantika (2019)	Jurnal Penyebab Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan pada Satuan Kerja (Satker) pada KPPN Solok Periode 2019	Sumber Daya Manusia	Deskriptif Kualitatif	minimnya SDM yang kompeten, kurangnya teknologi informasi yang menyebabkan ketidaktepatan waktu, kurangnya sarana pendukung, sistem pengendalian internal yang kurang jelas, dan para pegawai kurang memahami peraturan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PP menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan.
5	Nanda Rafsanjani,	Analisis Keterlambatan	Sumber Daya	Deskriptif Interaktif	Kualitas sumber daya manusia dan

	Charoline Cheisviyanny (2021)	Laporan Pertanggung jawaban realisasi APBDes (Studi kasus pada kabupaten Pasaman Barat)	Manusia		sarana prasarana yang kurang memadai, adanya rangkap jabatan, adanya peraturan yang tidak konsisten dalam hal pelaporan pertanggung jawaban.
--	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Penulis., 2021

2.3. Kerangka Pemikiran

Pengertian laporan keuangan berdasarkan SAK adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, seperti: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Laporan keuangan melambangkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, peningkatan realisasi dalam mencapai target pendapatan, realisasi penerapan belanja, dan realisasi pembiayaan. Berdasarkan penelitian penulis sebelumnya, penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan terdiri dari tiga bagian yaitu, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Akuntansi.

Desiana wati (2014) mengemukakan bahwa Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan suatu entitas yang tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusianya. Kompetensi merupakan dasar bagi seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan akan dapat terhindar dari pemborosan

waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia akan dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi apabila Sumber Daya Manusia yang dipekerjakankan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang terakreditasi, mengikuti pendidikan dan pelatihan secara teratur, dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi secara utuh.

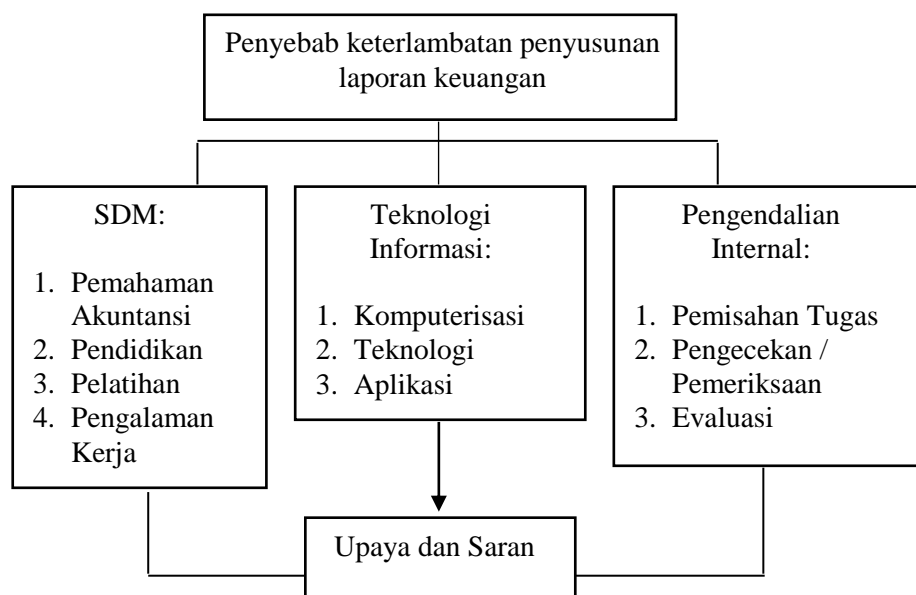
Menurut Darmawan (2012:17) Hasil rekayasa manusia dalam proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya. Dukungan penggunaan teknologi informasi ini juga membantu mempercepat proses pengumpulan informasi, khususnya dalam mengantisipasi besarnya perubahan-perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sering terjadi.

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2006, Pengendalian Internal adalah suatu proses dibawah pengaruh manajemen untuk menciptakan keyakinan yang memadai atas pencapaian efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tujuan SPIP adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya hal-hal berikut: (1) Efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Negara, (2) tingkat keandalan Laporan Keuangan, (3) melindungi aset Negara, dan (4) mematuhi peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern adalah

sarana untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan memainkan peran penting dalam pencegahan, pendeteksian kesalahan dan penyalahgunaan.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis yang telah dijelaskan diatas, kerangka konseptual untuk penelitian ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis., 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:53), metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai-nilai variable bebas baik satu variabel atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkan variable-variabel yang berbeda. Penelitian deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, digambarkan atau dimodelkan dengan pendekatan kuantitatif. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan serta upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penyusunan laporan keuangan.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Utara yang beralamat di Gedung Bank Sumut Jl. Imam Bonjol no. 18 Lt.7 Medan, Sumatera Utara. Dan penelitian dilakukan dari Maret 2021 sampai dengan selesai. Tahapan skedul penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun															
		Sep-20			Jul-21			Agu-21			Nov-21			Feb-22			
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■										
3	Seminar proposal						■										
4	Perbaikan/Acc Proposal						■	■									
5	Pengolahan Data								■	■							
6	Penyusunan Skripsi										■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi												■	■			
8	Sidang Meja Hijau														■	■	

Sumber: Skedul Proses Penelitian., 2021

3.3. Variable Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:38), Variabel penelitian adalah segala sesuatu apapun jenisnya, yang diidentifikasi oleh penulis yang sedang dipelajari untuk mengumpulkan informasi tentang hal tersebut, kemudian menarik kesimpulan. Penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) variabel tunggal yaitu Penyebab Keterlambatan penyusunan Laporan Keuangan, antara lain Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal.

3.3.2. Definisi Operasional

Menurut Rusiadi, et al (2014:88), definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup batasan penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan alat ukur/instrumen. Berikut adalah tabel definisi operasional:

Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator
Penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan		
1. Sumber Daya Manusia	faktor penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya (Sumber: Desiana Wati, 2014)	1. Pendidikan 2. Pengalaman 3. Pengetahuan 4. Keterampilan
2. Teknologi Informasi	Hasil rekayasa manusia dalam proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya. Dukungan penggunaan teknologi informasi ini juga membantu mempercepat proses pengumpulan informasi, khususnya dalam mengantisipasi besarnya perubahan-perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang sering terjadi. (Sumber: Darmawan, 2012)	1. Komputerisasi 2. Teknologi 3. Aplikasi
3. Pengendalian Internal	suatu proses dibawah pengaruh manajemen untuk menciptakan keyakinan yang memadai atas pencapaian efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. (Sumber: PP No 8 Tahun 2006)	1. Pemisahan Tugas 2. Pengecekan / Pemeriksaan 3. Evaluasi

Sumber: Penulis., 2021

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dan Data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:225), data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan komunikasi menggunakan pertanyaan secara lisan kepada staf bidang akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan melalui observasi langsung atau pengamatan lapangan. Menurut Sugiyono (2014:131), data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain dan bukan peneliti itu sendiri untuk tujuan yang lain, artinya data yang dikumpulkan oleh pihak kedua.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai didalam penelitian ini berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa dokumen yang berisi daftar Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan tahun 2019 dan dokumen pendukung lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72), wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi atau gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat direduksi menjadi satu

kesimpulan atau makna tentang suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang diketahui oleh narasumber.

b. Dokumentasi

Pendokumentasian menurut Sugiyono (2015:329) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku, catatan, arsip, dokumen, angka dan gambar tertulis berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian mengumpulkan data kemudian mengujinya.

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kenyataan di lapangan dengan dan pembahasannya berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga dari data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran.

- a. Mengumpulkan data melalui dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu. Dalam penelitian ini pengumpulan data berupa data jumlah OPD dan BUMD yang tidak/terlambat menyampaikan laporan keuangan ke BPKAD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.
- b. Membuat format wawancara untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai penyebab keterlambatan penyusunan Laporan keuangan.
- c. Melakukan wawancara dengan staf bagian bidang akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan.

Wawancara dalam penelitian ini bersifat terbuka, artinya hanya menanyakan poin-poin utama dari permasalahan.

- d. Dari wawancara yang telah dilakukan, selanjutnya menguraikan secara lebih rinci kendala-kendala yang menyebabkan keterlambatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- e. Dari pendeskripsian hasil wawancara yang diperoleh dan mempelajari faktor-faktor penyebab keterlambatan, kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator yang sesuai antara lain:

- 1) Faktor Sumber Daya Manusia dengan indikator, Pemahaman Akuntansi, Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman.
- 2) Faktor teknologi informasi dengan indikator, Komputerisasi, Teknologi, Aplikasi.
- 3) Faktor Sistem pengendalian Intern dengan indikator, Pemisahan Tugas, Pengecekan / Pemeriksaan, Evaluasi.

Unsur-unsur yang menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan keuangan maka akan diberi tanda dengan angka 1, yang tidak menjadi penyebab keterlambatan maka akan diberi tanda dengan angka 0. Dari jumlah unsur-unsur yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, jika menjadi penyebab keterlambatan persentase keterlambatannya akan dicari.

- f. Setelah mengelompokkan faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian menarik kesimpulan tentang tingkat keterlambatan, setelah itu melakukan analisis dengan mengaitkan penyebabnya, dan

mengidentifikasi keterlambatan penyusunan laporan keuangan dengan teori-teori yang ada dan memberikan saran atas keterlambatan yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan antar Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset. Terkait perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyuluhan dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota maka terbit Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terakhir terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4.1.2. Visi dan Misi

4.1.2.1. Visi

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, harapan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan potensi, serta prediksi tantangan dan peluang di masa yang akan datang. Visi tersebut merupakan gambaran kondisi masa depan yang menantang dan mengandung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan, membina, memfasilitasi, memantau, mengevaluasi, mengkoordinasikan, mengendalikan administrasi perbendaharaan dan kas daerah, penganggaran, pembukuan dan aset serta anggaran keuangan daerah Kabupaten/Kota selain berfungsi sebagai identitas masa depan, juga merupakan ekspresi yang jelas dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan membentuk masa depan yang realistis, dipercaya serta menjadi budaya instansi. Selaras dengan itu, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah: **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Professional, Akuntabel dan Transparan, Berbasis Teknologi Informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.** Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan pandangan yang berbeda, perlu dijelaskan hakikat yang terkandung dalam visi dimaksud sebagai berikut:

- a. Terwujudnya: Cita-cita yang ingin dicapai dan sifatnya selalu mengarah yang Lebih Baik.
- b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Penatausahaan keuangan dan aset daerah dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.
- c. Profesionalisme: mengacu pada peningkatan kualitas proses dan hasil kerja yang optimal, yang menjunjung tinggi etika dan integritas.
- d. Bertanggungjawab: Dapat dipertanggung jawakan, harus mencapai tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- e. Transparan: Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan instansi.
- f. Berbasis Teknologi Informasi: Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.
- g. Ketentuan yang berlaku: Melaksanakan tugas dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan.

4.1.2.2. Misi

Misi adalah hal yang perlu dicapai atau dilakukan oleh suatu Instansi Pemerintah sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan instansi tersebut tercapai dan berfungsi dengan baik. Dengan misi ini diharapkan semua perangkat dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan dicapai di masa depan dari visi yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan visi dan memberikan kebijakan tentang tujuan yang akan diwujudkan, dan memusatkan pikiran terhadap program yang akan dilaksanakan dan memperkuat etos kerja, maka misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi

4.1.3. Susunan Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Badan
- b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
- c. Bidang Pengelolaan Anggaran terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Anggaran I
 - 2) Subbidang Pengelolaan Anggaran II
 - 3) Subbidang Pengelolaan Anggaran III
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perbendaharaan I
 - 2) Subbidang Perbendaharaan II
 - 3) Subbidang Kas Daerah
- e. Bidang Akuntansi terdiri atas:
 - 1) Subbidang Akuntansi I
 - 2) Subbidang Akuntansi II

3) Subbidang Akuntansi III

f. Bidang Aset terdiri atas:

1) Subbidang Analisis dan Kebutuhan Aset

2) Subbidang Pengelolaan Aset

3) Subbidang Penghapusan Aset

g. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas:

1) Subbidang Bina Keuangan I

2) Subbidang Bina Keuangan II

3) Subbidang Bins Keuangan III

4.1.4. Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Adapun tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Utara adalah:

a. Kepala Badan

Kepala Badan bertanggungjawab atas perumusan kebijakan teknis di Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta membantu penyelenggaraan Pemerintah. Untuk itu Kepala Badan mempunyai uraian tugas:

1) Menyelenggarakan pengembangan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar perumusan kebijakan Kepala Daerah.

- 2) Menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- 4) Menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- 5) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD.
- 6) Menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- 7) Menyelenggarakan penetapan SPD.
- 8) Menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 9) Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 10) Menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah.
- 11) Menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- 12) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
- 13) Menyelenggarakan kegiatan Badan dari perencanaan sampai evaluasi sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- 14) Mengatur kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan tujuan kinerja yang ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai.
- 15) Menjamin pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan semua staf dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- 16) Memisahkan tugas-tugas yang terkait mulai dari Badan sampai dengan Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya sehingga tugas dapat terlaksana dengan efektif dan tepat waktu.
- 17) Memberikan instruksi kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidangnya agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- 18) Membina administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, dan pengendalian administrasi pemerintah dengan dasar pedoman dan peraturan yang ditetapkan sehingga tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
- 19) Mempertimbangkan kepada Gubernur tentang pemecahan masalah terkait dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara lisan ataupun tertulis sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- 20) Menjalankan tugas kedinasan lainnya terkait tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola

keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang ditugaskan oleh Gubernur.

b. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu, serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset Badan. Untuk itu Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- 1) Membina, membimbing dan memberikan arahan kepada staf di lingkungan Sekretariat.
- 2) Mengolah dan menyajikan bahan/data dalam penyelenggaraan kesekretariatan.
- 3) Menyiapkan susunan rencana dan program kegiatan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Menyusun ketetapan kebijakan umum ketatausahaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian, program, akuntabilitas dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan.
- 5) Mengkoordinir, membina, memfasilitasi, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan kebijakan organisasi di sekretariat.
- 6) Melakukan pengkajian dan analisa pengelolaan sekretariat.
- 7) Memberikan konsultasi dan pendampingan terhadap sekretariat.
- 8) Penyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sekretariat.
- 9) Memantau dan mengobservasi penyelenggaraan sekretariat.
- 10) Mengembangkan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan sekretariat sesuai peraturan yang berlaku.

- 11) Memberikan bimbingan teknis sumber daya aparatur keuangan
- 12) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat rapat internal dan eksternal
- 13) Menyusun dan menyempurnakan saran staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian kebijakan.
- 14) Menyampaikan rekomendasi dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tulisan sebagai masukan demi kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan
- 16) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang ditetapkan.

c. Bidang Pengelolaan Anggaran

Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai uraian tugas:

- 1) Menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- 2) Memverifikasi RKA-OPD/RKA-PPKD.
- 3) Menyelenggarakan verifikasi DPA-OPD/DPA-PPKD dan DPA-L.
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah.
- 5) Melaksanakan informasi anggaran daerah.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran.

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab membantu kepala badan dalam menyelenggarakan urusan perbendaharaan dan kas daerah. Untuk itu Kepala Bidang Perbendaharaan kas daerah mempunyai uraian tugas, antara lain:

- 1) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- 2) Melaksanakan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mengkoordinasi proses pengajuan pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya.
- 4) Melakukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D).
- 5) Menempatkan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah.
- 6) Melakukan pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- 7) Melaksanakan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- 8) Mempersiapkan dan menerbitkan SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran).
- 9) Melakukan pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- 10) Menyusun laporan aliran kas.

- 11) Melakukan pemungutan/pemotongan serta penyeteran PFK (perhitungan fihak ketiga).
- 12) Mengelola piutang dan utang daerah.
- 13) Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek untuk penerimaan daerah.
- 14) Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan SP2D dengan instansi terkait.
- 15) Menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek.
- 16) Melaksanakan konsultasi dan bantuan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah.
- 17) Melaksanakan hubungan kerja sama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah antar organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, yayasan, lembaga perbankan, pemerintah kabupaten/kota.
- 18) Memberikan bimbingan teknis sumber daya aparatur pengelola urusan perbendaharaan dan kas daerah.
- 19) Mempersiapkan pengangkatan dan penggantian pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu.
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Kepala Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas:

- 1) Menyusun gambaran umum kebijakan dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 3) Mengevaluasi konsep dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 4) Menyusun informasi tentang tanggung jawab pelaksanaan APBD.
- 5) Memberikan pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 6) Melakukan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah.
- 7) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan.
- 8) Menjalankan tugas-tugas administrasi perkantoran.

f. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin kepala bidang yang bertanggungjawab membantu Kepala Badan dalam menganalisis dan menggunakan aset, Pengelolaan

aset serta penghapusan aset Pemerintah Provinsi. Untuk itu Kepala Bidang Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada ruang lingkup bidang aset.
- 2) Mengolah bahan, data dan informasi untuk menyusun kebijakan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- 3) Menyusun peraturan pengelolaan barang milik daerah dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan bidang aset.
- 4) Melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian, investigasi dan evaluasi, pengelolaan dan kebijakan penyelenggaraan urusan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
- 5) Mengkaji dan menganalisis kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah untuk ditetapkan menjadi daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang tahun anggaran berjalan.
- 6) Melaksanakan, meneliti RKA dan DPA SKPD berdasarkan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang telah ditetapkan.
- 7) Mengkoordinasi, membimbing pengelolaan aset provinsi, Kab/Kota dan BUMD Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 8) Melaksanakan penatausahaan, penggolongan dan penandaan barang daerah/aset sesuai standar yang ditetapkan.
- 9) Menetapkan status penggunaan barang daerah kepada unit pemakai barang hasil pengadaan/pembelian, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- 10) Memberikan informasi dan komunikasi publik, dalam hal penyelenggaraan bidang aset sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 11) Menyusun standar satuan harga sesuai peraturan perundang-undangan.
- 12) Mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi pemindah tanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- 13) Mengkoordinasi, monitoring pelaksanaan penjualan barang milik daerah secara langsung atau lelang umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- 14) Mengkoordinasi, memfasilitasi, memberikan penilaian atau penaksiran terhadap barang milik daerah dengan pihak lain sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- 15) Mnyusun laporan barang persediaan dan aset tetap di lingkungan organisasi perangkat daerah.
- 16) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan tahunan tentang pengelolaan barang milik daerah.
- 17) Melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah atas usulan OPD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 18) Menjalankan pembinaan, koordinasi dan evaluasi dan melakukan penilaian atau penaksiran harga BMD dalam rangka pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD, sesuai ketentuan yang berlaku.
- 19) Memberikan konsultasi dan asistensi pengembangan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan.
- 20) Melakukan hubungan kerjasama dan kemitraan atas penyelenggaraan analisis kebutuhan, pengelolaan aset dan penghapusan.
- 21) Memfasilitasi dan melakukan koordinasi penyelenggaraan rapat internal dan eksternal di bidang aset.
- 22) Menyusun saran staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 23) Memberikan masukan kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- 25) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

g. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah. Untuk itu Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota Mempunyai uraian tugas:

- 1) Melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2) Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperdakada dan/ atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD terhadap 33 Kabupaten/Kota
- 3) Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 Kabupaten/Kota
- 4) Memfasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat terhadap data keuangan daerah 33 Kabupaten/Kota
- 5) Memfasilitasi penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota
- 6) Menerima dan memberikan penjelasan terkait konsultasi dan Koordinasi Kepada 33 DPRD Kabupaten/ Kota
- 7) Merupakan Perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam peneraan sanksi administratif kepada 33 Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan keuangan daerah
- 8) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Bina Keuangan daerah
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah

- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah.

4.1.5. Data Personalia

Dari segi kepegawaian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi kuota struktur organisasinya, yang terlihat jelas dibawah ini pada data kepegawaian jumlah pegawai, jumlah pimpinan BPKAD Provinsi Sumatera Utara memiliki susunan data personalia, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data Personalia Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

1	Jumlah Pegawai:	
	PNS	109
	CPNS	3
2	Honorer	65
	Jenis Pendidikan:	
	S3	1
	S2	16
	S1	100
	D3	12
3	SMA	48
	Golongan/Pangkat:	
	IV	12
	III	87
	II	13

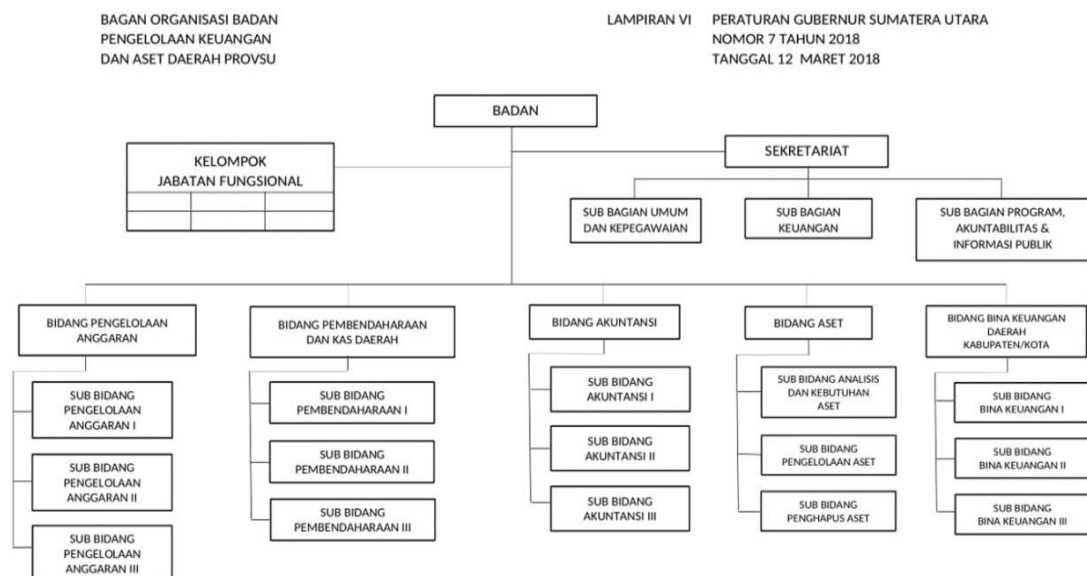
Sumber: BPKAD Provsu., 2021

4.1.6. Stuktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan posisi, fungsi, dan jabatannya dalam suatu instansi untuk menentukan bagaimana

instansi bekerja demi mencapai tujuan instansi. Struktur organisasi mengatur pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu di mana, setiap orang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam suatu instansi dibentuk dalam struktur dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan instansi untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Struktur organisasi juga juga perlu membentuk sistem hubungan dalam organisasi agar tercapainya efisiensi dan komunikasi yang efektif, koordinasi dan integrasi semua kegiatan instansi baik secara vertikal maupun horizontal dari setiap kegiatan instansi. Organisasi bertujuan untuk membina keharmonisan kerja, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan penuh tanggung jawab. Rencana kerja dapat dilaksanakan dengan benar dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Berikut ini disajikan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara:

Gambar 4.1. Stuktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPKAD Provsu., 2021

4.1.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini membandingkan kenyataan yang ada dilapangan dengan teori-teori, pembahasan penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara narasumber, proses dan hasil analisis data. Dalam bab ini akan dipaparkan hasil analisis penelitian mengenai sumber daya manusia, Teknologi Informasi dan pengendalian internal menjadi penyebab keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4.1.7.1. Sumber daya manusia sebagai indikator penyusunan Laporan Keuangan

Sumber daya manusia memiliki arti penting di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, karena dalam meningkatkan kualitas kinerja, efisiensi dan kegiatan operasional instansi pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang menjalankannya. Selain itu, keberadaan manusia didalam organisasi adalah aset yang mempengaruhi keberhasilan target atau tujuan organisasi sehingga sumber daya manusia tidak dapat tergantikan.

Seperti yang kita ketahui bersama pada era moderenisasi sekarang sudah banyak sekali pengganti tenaga kerja manusia, namun dunia akuntansi juga dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya. Pegawai yang memiliki kemampuan lebih akan menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Semakin baik tingkat pendidikan dan semakin teratur mengikuti pelatihan maka semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah akan efektif jika kualitas sumber daya manusia yang dimiliki diatur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Tabel 4.2. Faktor-Faktor Sumber Daya Manusia

Penyebab Keterlambatan	Faktor Keterlambatan			
	Pemahaman Akuntansi	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman Kerja
Sumber Daya Manusia	1	1	0	0
Jumlah	1	1	0	0
Presentase (%)	50%	50%	0%	0%

Sumber: Penulis., 2021

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, narasumber menyatakan bahwa tidak semua pegawai ditempatkan diposisi yang tepat berdasarkan dengan latar belakang pendidikannya, dan kurang tersedianya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam suatu organisasi tercermin dari sumber daya manusia yang ada dibidang akuntansi tersebut, antara lain:

a. Pemahaman Akuntansi

Akuntansi merupakan dasar yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang bermanfaat bagi kelangsungan organisasi. Pemahaman tentang akuntansi merupakan persyaratan utama untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sebagai instansi pemerintah pengetahuan mengenai akuntansi diperlukan unuk dapat memberikan informasi pelaporan keuangan, hal ini mempengaruhi hasil pelaporan dan pengambilan keputusan apabila keterlambatan penyusunan keuangan dipengaruhi oleh staf bidang akuntansi yang belum memahami akuntansi dan laporan keuangan dengan baik. Semakin terperinci kegiatan dan pengeluaran dana maka akan semakin berat juga tanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut hasil penelitian, Badan

Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Namun berkenaan dengan pemahaman akuntansi, beberapa dari pegawai di bidang akuntansi kurang memahami ilmu akuntansi itu sendiri. Hal ini memberikan pengaruh kepada efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan.

b. Latar belakang pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi semua masyarakat untuk mencerdaskan dan mengembangkan kemampuan di dalam diri. Dengan adanya pendidikan, sumber daya manusia akan semakin handal. Dalam pekerjaan latar belakang pendidikan menjadi poin utama dalam penempatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan kedepannya. Latar belakang pendidikan berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan. Jika memiliki riwayat pendidikan yang sesuai dengan bidangnya dan mengikuti standar yang ditetapkan maka laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas. Menurut hasil penelitian, pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan tugas dan fungsi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan mengalami kendala. Diharapkan meningkatkan kualitas diri dengan melanjutkan, menekuni dan mendalami ilmu akuntansi untuk menciptakan laporan keuangan yang baik.

c. Pelatihan

Pelatihan dimaksudkan untuk membina dan memberikan pendidikan jangka pendek yang bermanfaat untuk dapat menambah wawasan serta

pemahaman mendalam. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan pelatihan untuk mengasah, memperbaiki performa kerja. Jika mengikuti pelatihan secara teratur tentunya akan memberikan pemahaman lebih mengenai akuntansi dan membuat Penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah. Menurut hasil penelitian, dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pelatihan selalu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk meningkatkan pemahaman akuntansi baik untuk Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Selain pelatihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan sosialisasi terkait regulasi dan pembaharuan aplikasi keuangan yang digunakan.

d. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja memberikan kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bidang akuntansi dan fungsinya. Semakin lama berkerja di bidang akuntansi maka semakin mahir dan paham mengenai ilmu akuntansi yang diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan. Kemampuan tidak dapat diprediksi hanya berdasarkan pendidikan, namun pengalaman kerja ikut andil dalam melihat kemampuan pegawai dalam menyelesaikan masalah. Menurut hasil penelitian, pegawai yang menyusun laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama di bidang akuntansi, walaupun tidak berlatarbelakang pendidikan

akuntansi, pengalaman kerja yang cukup lama memungkinkan pegawai beradaptasi dengan situasi dan kondisi serta masalah yang ada.

4.1.7.2. Teknologi Informasi sebagai indikator penyusunan Laporan Keuangan

Teknologi informasi atau *information technology* adalah teknologi yang mendukung, memfasilitasi, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari teknologi informasi, dimana penyusunan dan penyampaian laporan keuangan lebih cepat dan tepat waktu. Teknologi informasi bermanfaat dalam hal kecepatan pengolahan data-data transaksi Pemerintah yang dari tahun ke tahun semakin besar, serta dari segi kualitas data yang semakin kompleks dan rumit dikarenakan peningkatan total jumlah APBN/D dari tahun ke tahun.

Tabel 4.3. Faktor-Faktor Teknologi Informasi

Penyebab Keterlambatan	Faktor Keterlambatan		
	Komputerisasi	Teknologi	Aplikasi
Teknologi Informasi	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Presentase (%)	0%	0%	0%

Sumber: Penulis., 2021

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, narasumber menyatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk mencatat setiap transaksi serta mempermudah pekerjaan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi tidak bisa dihindarkan. Segala sesuatu menjadi mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini dan akan terus berkembang. Pemanfaatan teknologi informati serta didampingi dengan keahlian yang mumpuni akan meningkatkan hasil kinerja organisasi. Adapun unsur dalam teknologi informasi, antara lain:

a. Komputerisasi

Komputerisasi telah menjadi salah satu hal yang sangat terpenting pada zaman modern seperti sekarang ini. Proses pencatatan atau penjurnalan secara manual sudah banyak ditinggalkan. Penggunaan komputer/laptop merupakan salah satu contoh teknologi informasi yang membantu dalam pembuatan laporan keuangan. Organisasi dapat mengatur dan mengelola keuangan dengan presisi serta mengurangi kesalahan perhitungan secara manual. Peningkatan kualitas dan efisiensi pembuatan laporan keuangan juga dapat dilihat dari penggunaan komputerisasi. Menurut hasil penelitian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menggunakan komputer/laptop sebagai perangkat utama, mengolah data menjadi informasi yang lebih bermanfaat sehingga dihasilkannya informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu. Penggunaan komputer/laptop serta wifi sangat bermanfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan laporan keuangan lebih efisien dan praktis menggunakan komputer/laptop serta mengurangi kekeliruan.

b. Teknologi

Teknologi merupakan sarana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi mengurangi hambatan-hambatan yang ada dan telah menciptakan kebiasaan baru. Kinerja yang dihasilkan akan sesuai dan mendapatkan banyak kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan jika teknologi yang digunakan tepat. Menurut hasil penelitian, setiap transaksi yang terjadi sampai dengan pembuatan laporan keuangan memanfaatkan teknologi, yakni pemanfaatan website dan aplikasi. Setelah menggunakan website dan aplikasi penyampaian laporan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah. Masyarakat serta para pengguna laporan keuangan lainnya juga dapat mengakses laporan keuangan di website sebagai dasar pengambilan keputusan, pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengeluaran, pemantauan masyarakat terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memberikan informasi mengenai tugas dan fungsi bidang-bidang pada BPKAD, halaman interaksi masyarakat ke BPKAD, kegiatan-kegiatan dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibagikan oleh admin website, serta penggunaan lainnya.

c. Aplikasi

Dalam pembuatan laporan saat ini tidak terlepas dari penggunaan aplikasi untuk mempermudah dan mencegah kesalahan. Aplikasi merupakan program yang dibuat untuk melakukan fungsi sesuai dengan penggunaannya. Dengan penggunaan aplikasi membantu mengurangi konsumsi kertas dan membuat penyimpanan data lebih aman. Aplikasi yang membantu pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan antara lain Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang membantu dalam pengendalian transaksi dan menciptakan informasi yang tepat dan akurat. Pengembangan aplikasi SIMDA saat ini mempunyai beberapa program diantaranya, SIMDA Keuangan, SIMDA BMD (barang milik daerah), SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, SIMDA *Dashboard*, dan SIMDA CMS (*Cash Management System*/kasda online/SP2D Online). Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) mengatur tentang prinsip penyelenggaraan SPBE yaitu efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, tanggungjawab, interoperabilitas, dan keamanan. Menurut hasil penelitian, pemanfaatan aplikasi dalam pencatatan dan pembuatan laporan keuangan sangat membantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penggunaan aplikasi SIMDA yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), aplikasi SIPD (Sistem INformasi Pembangunan Daerah), serta E-Keuangan merupakan aplikasi yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pencatatan transaksi atau pembuatan laporan hingga penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD. E-keuangan dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif serta efisien karena memuat hal hal terperinci yang dapat diakses secara cepat atau *realtime*. Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) memiliki keunggulan untuk menyediakan data informasi akurat pembangunan daerah terkini yang disajikan kepada masyarakat sebagai

dokumen pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

4.1.7.3. Pengendalian Internal sebagai indikator penyusunan Laporan Keuangan

Pengendalian internal adalah mengatur, mempengaruhi, menentukan sumber daya manusia untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Pengendalian internal dapat mencegah terjadinya pemborosan, menyelaraskan pegawai agar lebih taat dalam mengikuti peraturan yang telah ditetapkan serta menciptakan laporan keuangan yang efektif, efisien. Pengendalian internal meliputi, persetujuan, data yang dapat dipercaya, memisahkan fungsi kegiatan, penyimpanan, pencatatan, serta pemantauan terhadap aset kekayaan.

Pengendalian internal atas laporan keuangan adalah proses yang dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan ataupun penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan yang andal tidak terlepas dari pengendalian internal yang baik oleh organisasi.

Tabel 4.4. Faktor-Faktor Pengendalian Internal

Penyebab Keterlambatan	Faktor Keterlambatan		
	Pemisahan Tugas	Pengecekan / Pemeriksaan	Evaluasi
Pengendalian Internal	0	0	1
Jumlah	0	0	1
Presentase (%)	0%	0%	100%

Sumber: Penulis., 2021

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, narasumber mengatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Aderah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan pengendalian internal sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Selain itu, dalam pemberian wewenang kepada pegawai akuntansi sudah sesuai dengan fungsi, tugas dan uraian tugasnya. Penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tak terlepas dari Penyampaian Laporan Keuangan Oleh OPD dan BUMD. Adapun unsur dalam pengendalian internal, antara lain:

a. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dalam modul BPKP (2009:6) adalah pemberian izin untuk melakukan segala macam kegiatan sesuai dengan fungsinya dengan maksud meningkatkan kinerja organisasi. Tugas yang diberikan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Tujuan dari pemisahan tugas adalah agar tidak adanya kekeliruan dalam menjalankan fungsinya. Pegawai yang bertanggungjawab dan sesuai dengan bidangnya akan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Menurut hasil penelitian, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menempatkan pegawainya sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya tidak ada rangkap jabatan. Penyusunan dan pembuatan laporan yang dilakukan oleh pegawai bidang akuntansi sudah menjalankan tugas dan fungsi dengan sangat baik.

b. Pengecekan/Pemeriksaan

Pentingnya kelengkapan dari laporan keuangan yang disampaikan membuat pengecekan serta pemeriksaan harus dilakukan. Pengecekan dalam pengendalian internal ini berarti bahwa laporan keuangan yang diterima baik melalui surat ataupun melalui aplikasi harus diperiksa secara

menyeluruh apakah terdapat kekurangan. Pengecekan itu sendiri memiliki arti suatu proses mengecek, memeriksa, meneliti berkas secara seksama. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2015 Tentang Tata cara pemeriksaan, maka pemeriksaan itu sendiri merupakan kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan. Pemeriksaan berguna untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan serta demi melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian, laporan keuangan yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sudah memiliki kelengkapan berkas yang cukup. Pengecekan kelengkapan berkas laporan keuangan selalu dilakukan dan dicatat oleh pegawai bidang akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja kedepannya dan memecahkan solusi atas masalah masalah yang terjadi sebelumnya. Evaluasi yang dimaksud dalam bab ini yaitu pemberian sanksi terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik daerah yang dalam penyampaian laporan keuangannya mengalami keterlambatan. Untuk meningkatkan hasil laporan keuangan yang tepat waktu, diperlukan evaluasi serta pemberian peringatan untuk dijadikan pembelajaran kedepannya. Menurut hasil penelitian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap menerima keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik

Daerah hanya mendapat surat teguran sebanyak 3 kali, seburuk buruknya sanksi yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah akan dievaluasi oleh gubernur. Tidak adanya sanksi yang tegas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan.

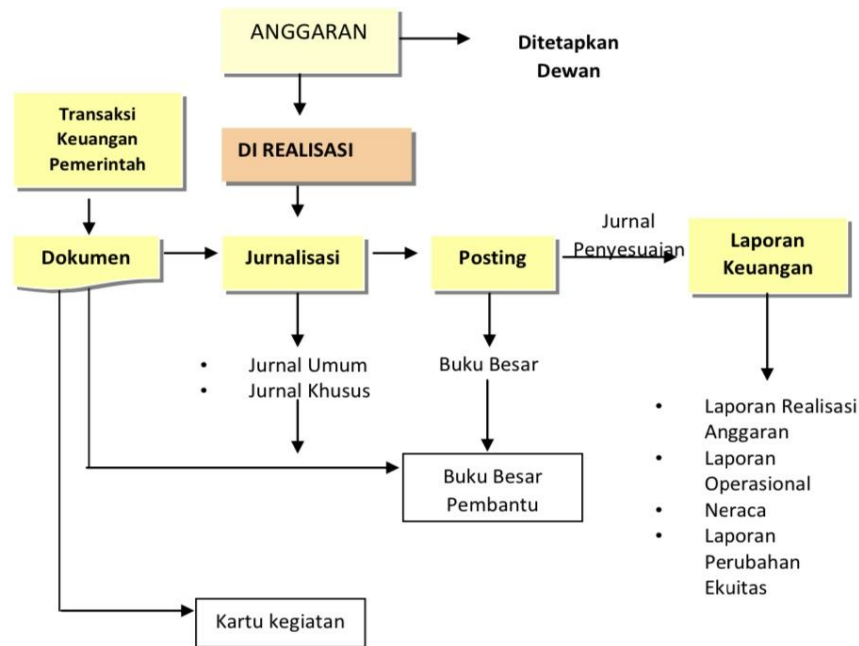
4.1.7.4. Standar/Prosedur Pelaporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pusat atau daerah. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah bagian Akuntansi adalah bagian yang menerima setiap laporan keuangan baik per triwulan ataupun setiap periodenya dari Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta menyusun sendiri laporan keuangannya untuk disampaikan kepada inspektorat sebagai bahan pertanggungjawaban. Dalam proses pencatatan laporan keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara melalui tahap dari rancangan anggaran yang ditetapkan dewan pada periode tersebut, direalisasikannya rancangan anggaran sehingga menimbulkan transaksi dimana transaksi itu berupa dokumen yang di jurnal dan diposting dan sehingga terbentuknya laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara diantaranya, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Siklus Akuntansi Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 4.2. Siklus Akuntansi Pemerintah



Sumber: <https://www.academia.edu>

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menerima laporan keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah setiap periodenya, laporan Keuangan yang disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Badan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Sekretaris Badan Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas mengelola surat masuk dan surat keluar. Laporan Keuangan tersebut diserahkan ke Bidang Akuntansi untuk menerima dan mengelola laporan keuangan tersebut sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menyusun Laporan

keuangannya dan mengirim Laporan Keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah ke inspektorat.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh terdapat 2 (dua) alasan utama mengapa Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatera Utara dapat mengalami keterlambatan yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah pegawai yakni 177 orang pegawai. Bidang yang bertanggung jawab atas penerimaan laporan keuangan dari OPD dan BUMD adalah Bidang Akuntansi. Bidang Akuntansi BPKAD memiliki 15 orang pegawai. Tingkat pendidikan Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu S2 berjumlah 4 orang. Pendidikan terakhir kedua pegawai S2 tersebut yaitu Magister Sains. Sumber daya manusia yang berpendidikan terakhir S1 berjumlah 8 orang. Dari 8 pegawai tersebut S.E (Sarjana Ekonomi) berjumlah 7 orang, dan Sarjana S.Sos (Sarjana Ilmu Sosial) berjumlah 1 orang. Sumber daya manusia yang berpendidikan terakhir D3 berjumlah 1 orang dengan pendidikan terakhir Ahlimadyah Komputer. Sumber daya manusia yang berpendidikan terakhir SMA berjumlah 2 orang. Pada indikator Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi dan Pendidikan menjadi faktor penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan presentase masing-masing 50%. Beberapa pegawai yang berada di bidang akuntansi

tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, sehingga pemahaman mengenai akuntansi juga kurang dan minim. Pada praktiknya tidak semua kebutuhan instansi bisa tersedia sesuai keinginan. Pegawai di bidang akuntansi memiliki pengalaman dalam pembuatan laporan keuangan untuk waktu yang cukup lama sehingga sedikit banyaknya memahami akuntansi walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Pelatihan dilakukan untuk seluruh OPD dan BUMD yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai laporan keuangan pemerintah.

b. Pengendalian Internal

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara telah memisahkan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi. Dalam penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari Bidang Akuntansi BPKAD. Bidang Akuntansi melaksanakan identifikasi dan klarifikasi transaksi penerimaan, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan menyusun laporan keuangan BPKAD. Laporan keuangan yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang diterima setiap periodenya akan diperiksa oleh BPKAD kelengkapannya. Laporan keuangan BPKAD terdiri dari Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan konsolidasi dari laporan keuangan 44 Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pada faktor pengendalian internal indikator yang

dominan adalah di evaluasi, yakni 100% karena kurangnya pemberian sanksi yang tegas atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah menghambat BPKAD dalam pembuatan laporan konsolidasi. Keterlambatan tersebut menyebabkan sistem dan prosedur akuntansi di BPKAD tidak dapat berjalan dengan baik. Keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah telah diberi surat teguran oleh BPKAD, namun dengan adanya surat peringatan saja tidak mampu mencegah keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. Penyampaian data tersebut tepat waktu apabila sanksi tegas juga diterapkan BPKAD atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terbesar keterlambatan penyusunan laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara yaitu latar belakang pendidikan pegawai serta pemahaman akuntansi pada SDM, kurangnya sanksi tegas terhadap OPD dan BUMD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagai faktor pengendalian internal.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wike Mustika (2017) yang menyatakan bahwa Faktor SDM pada indikator latar belakang pendidikan, sistem pengendalian intern pada indikator rangkap jabatan, dan aturan hukum pada indikator minim pemahaman peraturan perundang-undangan menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Febilia

Yolanda (2015) yang menyatakan bahwa Nilai informasi akan andal jika memiliki sumber daya manusia yang lebih tegas dalam menerapkan sanksi dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut dan tidak memberikan tanda tangan atas penerimaan laporan keuangan yang terlambat diserahkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kiki Oktria Fitriandhani (2019) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan yaitu teknologi informasi yang sering mengalami eror dan wewenang dan prosedur pencatatan yang masi memberikan kesempatan kepada SKPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Bidang Akuntansi BPKAD belum menerapkan sanksi yang tegas atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan SKPD. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mirawati, Nesa Yuliantika (2019) yang menyatakan bahwa kurangnya SDM yang kompeten dalam penyampaian laporan keuangan, sistem pengendalian internal yang kurang jelas pembagian tugas dalam or menjadi penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nanda Rafsanjani, Charoline Cheisviyanny (2021) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya yang kurang memadai menjadi permasalahan dalam melaporkan pertanggungjawaban karena kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan keterlambatan penyusunan laporan keuangan disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yakni pemahaman akuntansi dan latar belakang pendidikan yang tidak kompeten dan tidak sesuai dengan bidangnya serta faktor pengendalian internal yakni evaluasi dimana organisasi perangkat daerah dan badan usaha

daerah yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan tidak diberi sanksi yang tegas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia dengan indikator pemahaman akuntansi dan latar belakang pendidikan akuntansi yang tertinggal dalam mempersiapkan laporan keuangan, menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan pernyataan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dikarenakan bagian bidang akuntansi memiliki latar belakang akademik yang tidak relevan dengan bidangnya.
- b. Sistem Pengendalian Internal dengan indikator evaluasi menjadi penyebab keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan kurangnya pemberian sanksi yang tegas terhadap Organisasi Perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang terlambat menyampaikan Laporan keuangannya

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Instansi Pemerintah, meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan dengan memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pemahaman

akuntansi pegawai yang menyusun laporan keuangan dengan mengikuti pelatihan, baik pelatihan mengenai akuntansi/keuangan maupun pelatihan mengenai aplikasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Sebaiknya instansi mempertimbangkan latar belakang pendidikan pegawai yang sesuai dengan tugasnya., sehingga laporan keuangan akan berkualitas dan berguna bagi penggunaannya, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan memberikan sanksi yang berat kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah karena terlambat penyampaian laporan hingga penyusunan laporan keuangan tidak tepat waktu.
- c. Bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah perlu dapat menyampaikan laporan keuangan tepat waktu agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti Dian dalam James M. Reeve. (2009). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Desmiyawati. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi.
- Hanafi, Rustam. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.8.
- Irawan, S., & Si, M. (2019). *Analisis manajemen persediaan, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di bei*. Jurnal Manajemen, 11(1).
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*, edisi revisi 2018. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nasution, N. A. (2019). *Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa*. Jurnal Perpajakan, 1(1), 37-53.
- Supriyono, R.A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Gajah Mada University Press.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). *Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan*. Kajian Akuntansi, 19(1), 09-18.
- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara*
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang *Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara*.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 tahun 2011 tentang *Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 Tahun 2013 Tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2016 Tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Penyajian Laporan Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang *Perangkat Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang *Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Purba, R. B., Erlina, H. U., & Muda, I. (2020). *Influence of Supply Chain Audit Quality on Audit Results through the Auditor's Ability in Detecting Corruption. Int. J Sup. Chain. Mgt* Vol, 9(3), 1046.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.